

Hak asasi manusia dalam peradilan internasional: Tantangan kontemporer

Syalaisha Kholila Kamilia

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: syalaishawijaya19@gmail.com

Kata Kunci:

HAM; internasional;
peradilan; kontemporer

Keywords:

HAM; international; justice;
contemporary

ABSTRAK

Penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam peradilan internasional merupakan isu penting di era globalisasi. Meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang kuat, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai konvensi internasional, tantangan kontemporer yang kompleks dan beragam tetap menghadang proses peradilan internasional. Beberapa tantangan tersebut termasuk resistensi politik dari negara-negara yang tidak mengakui kewenangan pengadilan internasional, serta munculnya isu-isu baru seperti keamanan siber,

perubahan iklim, dan teknologi baru yang menuntut adaptasi cepat dari pengadilan internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi erat antara negara-negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga HAM diperlukan untuk memastikan perlindungan HAM yang universal dan inklusif.

ABSTRACT

Upholding human rights (HAM) in international justice is an important issue in the era of globalization. Despite a strong international legal framework, such as the Universal Declaration of Human Rights and various international conventions, complex and diverse contemporary challenges continue to confront the international justice process. Some of these challenges include political resistance from countries that do not recognize the authority of international courts, as well as the emergence of new issues such as cybersecurity, climate change, and new technologies that demand rapid adaptation from international courts. In facing these challenges, close collaboration between states, international organizations, civil society and human rights institutions is necessary to ensure universal and inclusive human rights protection.

Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang menjadi landasan bagi keadilan, martabat, dan kemanusiaan dalam hubungan antarindividu, pemerintah, dan negara-negara di seluruh dunia. Dalam era globalisasi ini, peran peradilan internasional dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia menjadi semakin penting. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang kuat seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai konvensi internasional, tantangan kontemporer yang kompleks dan beragam tetap menghadang proses peradilan internasional.

Pertama-tama, penegakan hukum hak asasi manusia di tingkat internasional seringkali dihadapkan pada tantangan politik. Beberapa negara mungkin tidak



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengakui kewenangan pengadilan internasional atau menolak untuk mengikatkan diri pada instrumen hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat menghambat upaya peradilan internasional dalam menegakkan keadilan dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia.

Kedua, munculnya isu-isu baru dan kompleks seperti keamanan cyber, perubahan iklim, dan teknologi baru juga menimbulkan tantangan baru dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan internasional perlu beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dan mengembangkan kerangka hukum yang relevan dan efektif. Selain itu, isu-isu seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi rasial, dan ketidakadilan ekonomi juga tetap menjadi fokus utama peradilan internasional. Meskipun telah ada kemajuan dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak ini, upaya untuk menangani akar penyebabnya dan mewujudkan kesetaraan substansial masih menjadi tantangan yang besar.

Dalam konteks ini, peradilan internasional dihadapkan pada tugas yang kompleks dan menantang untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan secara efektif di seluruh dunia. Tantangan kontemporer ini menuntut kolaborasi yang erat antara negara-negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang universal dan inklusif.

Pembahasan

Hak Asasi Manusia dalam Keadilan Internasional (HAM) telah menjadi isu kritis dalam upaya mengakhiri impunitas atas pelanggaran HAM berat. Seperti Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dll. Contoh pengadilan internasional yang terkenal adalah Pengadilan Internasional untuk Rwanda dan Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia. Statuta Roma diadopsi oleh Mahkamah Internasional dan Mahkamah Internasional untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan merupakan dasar hukum untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Undang-undang ini mengatur kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang, antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Prodi Ilmu Pemerintahan, 2024).

Pengadilan dalam negeri juga memainkan peran penting dalam menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Namun pengadilan nasional harus mematuhi ketentuan hukum internasional dan mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku di pengadilan internasional. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius berkaitan erat dengan hukum internasional. Hukum internasional mengatur bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius adalah kejahatan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan oleh karena itu memerlukan penyelesaian yang efektif (Riyadi, 2020).

Yurisdiksi universal menyediakan cara untuk mengakhiri impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Yurisdiksi universal artinya semua negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran HAM berat dan tidak terbatas pada wilayahnya masing-masing (Argawati, 2023). Singkatnya, keadilan hak asasi manusia

internasional menjadi sangat penting untuk mengakhiri impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun badan peradilan ini juga menghadapi beberapa tantangan saat ini, termasuk kebutuhan akan pengetahuan komprehensif tentang hukum internasional, relevansinya dengan hukum internasional, dan peran pengadilan nasional dalam menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Tantangan Terkini dalam Menghadapi Pelanggaran HAM di Era Digital

Tantangan saat ini dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di era digital mencakup beberapa aspek yang sangat relevan. Kesenjangan digital menimbulkan salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di era digital. Kesenjangan ini dapat terwujud dalam bentuk ketimpangan akses internet, kesenjangan pendidikan, dan ketimpangan ekonomi. Kesenjangan ini dapat menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan fasilitas, sehingga menjadikan mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Asrori, 2022).

Kemajuan teknologi semakin meningkatkan permasalahan hak asasi manusia, khususnya pelanggaran data pribadi. Contoh yang terkenal adalah kebijakan digitalisasi data pemerintah seperti Kenya dan Irlandia. Kebijakan ini dinilai kurang tepat karena memaksa warga untuk bertukar data pribadi dalam jumlah besar dengan berbagai lembaga sosial. Digitalisasi mengalami percepatan di Indonesia sejak merebaknya pandemi. Namun, pemerintah masih menghadapi permasalahan di sana-sini, termasuk kesenjangan kepemilikan dan aliran data yang lebar. Data perilaku dan biometrik warga dikumpulkan dan diproses oleh perusahaan teknologi dan digunakan untuk membuat prediksi untuk berbagai tujuan, mulai dari pemasaran dan kampanye hingga propaganda politik. Jika tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dan regulasi digital yang tepat, hal ini dapat menyebabkan kesenjangan yang besar (Taqwim, 2022).

Digitalisasi membuka pemahaman dan bentuk hak asasi manusia baru yang perlu dilindungi dari ancaman otoritarianisme digital, penyalahgunaan data, dan desain tata kelola digital yang tidak berpusat pada manusia. Transformasi digital, selain gerakan kebebasan berekspresi, akan menimbulkan disparitas kesenjangan yang signifikan jika tidak dibarengi dengan pengembangan infrastruktur dan regulasi digital yang tepat.

Kemajuan teknologi ternyata banyak terdapat kesenjangan yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah kebijakan digitalisasi data yang dikeluarkan pemerintah seperti Kenya dan Irlandia yang dianggap tidak tepat karena memaksa warga untuk membagikan data pribadi dalam jumlah besar ke berbagai layanan sosial Masu. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hak digital dan tentunya merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Taqwim, 2022).

Ringkasnya, tantangan saat ini dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di era digital mencakup kesenjangan digital, pelanggaran privasi, kapitalisme pengawasan, desain tata kelola digital yang tidak berpusat pada manusia, dan inovasi teknologi yang tidak seimbang. Untuk mengatasi tantangan ini memerlukan kerja sama yang lebih erat antara para pihak dan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Keberlanjutan dan Relevansi Hukum Internasional dalam Masyarakat Multikultural

Keberlanjutan dan relevansi hukum internasional dalam masyarakat multikultural sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat multikultural. Ada beberapa aspek keberlanjutan dan relevansi hukum internasional dalam masyarakat multikultural.

Terbentuknya masyarakat multikultural yang baik di Indonesia tidak terjadi secara acak, namun memerlukan pendekatan yang sistematis. Hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat multikultural. Hukum internasional berfungsi sebagai dasar untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam masyarakat multikultural. Toleransi dan integrasi budaya sangat penting dalam masyarakat multikultural. Hukum internasional berperan dalam mengatur hubungan antar budaya dan masyarakat multikultural. Hukum internasional adalah landasan untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam masyarakat multikultural.

Konflik dan resolusi sangat penting dalam masyarakat multikultural. Hukum internasional berfungsi untuk mengatur dan menyelesaikan perselisihan. Hukum internasional berfungsi sebagai dasar untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam masyarakat multikultural. Penggunaan media sangatlah penting dalam masyarakat multikultural. Hukum internasional berperan dalam mengatur penggunaan media dan mengintegrasikan budaya yang berbeda. Hukum internasional berfungsi sebagai dasar untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam masyarakat multikultural (Khansa, 2021).

Kesimpulannya, keberlanjutan dan relevansi hukum internasional dalam masyarakat multikultural sangatlah penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural. Hukum internasional berperan penting dalam mengatur hubungan antar bangsa, masyarakat multikultural, dan kebudayaan yang berbeda. Hukum internasional berfungsi sebagai dasar untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam masyarakat multikultural.

Mendekatkan Keadilan: Aksesibilitas dan Keberlanjutan Sistem Peradilan Internasional

Mempromosikan keadilan melalui ketersediaan dan keberlanjutan sistem peradilan internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat global. Aksesibilitas terhadap sistem peradilan internasional sangat penting bagi kemajuan peradilan. Aksesibilitas tersebut dapat berupa akses terhadap informasi, akses terhadap fasilitas, dan akses terhadap prosedur peradilan yang adil dan transparan. Aksesibilitas ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak mempunyai akses terhadap sistem peradilan internasional dan mendapatkan peradilan yang adil.

Keberlanjutan sistem peradilan internasional sangat penting untuk mencapai keadilan (Prodi Ilmu Pemerintahan, 2024). Keberlanjutan ini dapat dilihat dari kemampuan sistem peradilan internasional dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan terus-menerus. Keberlanjutan ini sangat penting untuk memungkinkan sistem peradilan internasional berfungsi secara efektif dan efisien dalam mengatasi tantangan yang dihadapi komunitas internasional. Penggunaan teknologi sangat penting

untuk mendekatkan keadilan melalui aksesibilitas dan keberlanjutan sistem peradilan internasional. Teknologi dapat berbentuk sistem informasi yang efektif, sistem komunikasi berkecepatan tinggi, dan sistem peradilan digital. Penggunaan teknologi sangat penting untuk memungkinkan sistem peradilan internasional berfungsi secara efektif dan efisien dalam mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat global (Prodi Ilmu Pemerintahan, 2024).

Kerja sama internasional sangat penting untuk memajukan keadilan melalui aksesibilitas dan keberlanjutan sistem peradilan internasional. Kerja sama internasional berupa kerja sama antar negara, kerja sama antar organisasi internasional, dan kerja sama antar pihak terkait. Kerja sama internasional sangat penting agar sistem peradilan internasional dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat global. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk memajukan keadilan melalui aksesibilitas dan keberlanjutan sistem peradilan internasional. Pendidikan dan pelatihan mencakup bentuk-bentuk seperti pelatihan hukum, pelatihan teknis, dan pelatihan etika. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam sistem peradilan internasional mempunyai keterampilan yang mereka butuhkan untuk bekerja secara efektif dan efisien (Prodi Ilmu Pemerintahan, 2024).

Kesimpulannya, pendekatan keadilan melalui ketersediaan dan keberlanjutan sistem peradilan internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat global. Aksesibilitas, keberlanjutan, penggunaan teknologi, kerja sama internasional, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk memastikan sistem peradilan internasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat global.

Peran Teknologi dalam Penguatan Sistem Peradilan Internasional

Peran teknologi dalam memperkuat sistem peradilan internasional sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan aksesibilitas. Berikut beberapa aspek terkait peran teknologi dalam memperkuat sistem peradilan internasional:

1. **Penggunaan Teknologi Informasi:** Penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk memperkuat sistem peradilan internasional. Teknologi informasi dapat berbentuk sistem informasi yang efektif, sistem komunikasi berkecepatan tinggi, dan sistem peradilan digital. Pemanfaatan teknologi informasi membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan prosedur peradilan serta memudahkan aksesnya kepada Masyarakat (Fahmi, 2022).
2. **Pemanfaatan program dan aplikasi:** Di Indonesia, pemanfaatan program dan aplikasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan belum berkembang dengan baik. Program dan aplikasi yang membantu penyusunan undang-undang, seperti Solusi Perangkat Lunak Perancangan Legislatif, digunakan di banyak negara berbeda. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki penerapan indeks keterbacaan yang bertujuan untuk mengukur apakah teks suatu undang-undang mudah dipahami oleh masyarakat (Sucipto, 2021).

3. Tanda Tangan Elektronik: Sampai saat ini belum ada tanda tangan elektronik yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Presiden. Menurut kami, dasar hukum penggunaan tanda tangan elektronik sudah ada dan cukup. Penggunaan tanda tangan elektronik membantu meningkatkan keamanan dalam proses hukum (Sucipto, 2021).
4. Penggunaan Keamanan Cyber: Penggunaan keamanan cyber sangat penting untuk memperkuat sistem peradilan internasional. Keamanan cyber membantu melindungi sistem peradilan dari serangan siber dan mejamin keamanan data. Penggunaan keamanan cyber membantu meningkatkan keamanan dalam proses hukum (Siber, 2020).
5. Penggunaan Infrastruktur: Penggunaan infrastruktur teknologi sangat penting untuk memperkuat sistem peradilan internasional. Infrastruktur teknis dapat berupa sistem informasi yang efektif, sistem komunikasi berkecepatan tinggi, dan sistem peradilan digital. Pemanfaatan infrastruktur teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan prosedur peradilan serta memudahkan akses bagi masyarakat (Fahmi, 2022).

Kesimpulannya, peran teknologi dalam memperkuat sistem peradilan internasional sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan aksesibilitas. Penggunaan teknologi informasi, program dan aplikasi, tanda tangan elektronik, keamanan siber, dan infrastruktur teknis dapat membantu meningkatkan keamanan dalam proses hukum.

Kesimpulan dan Saran

Keberlanjutan dan relevansi hukum internasional dalam masyarakat multikultural sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat global. Hukum internasional berperan penting dalam mengatur hubungan antar bangsa, masyarakat multikultural, dan kebudayaan yang berbeda, serta menjamin kepastian dan keamanan. Pengadilan internasional harus beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dan mengembangkan kerangka hukum yang relevan dan efektif. Kerja sama internasional yang erat dan pendidikan serta pelatihan yang memadai diperlukan untuk memajukan keadilan melalui aksesibilitas dan keberlanjutan sistem peradilan

Daftar Pustaka

- Argawati, U. (2023, February 08). Yurisdiksi universal untuk mengakhiri impunitas pelanggaran HAM berat. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Asrori, A. M. (2022, July 12). Era tranformasi digital berdampak pada eskalasi pelanggaran HAM. *Nu Online*. <https://www.nu.or.id/nasional/era-transformasi-digital-berdampak-pada-eskalasi-pelanggaran-ham-b8DQy>
- Fahmi, M. A. (2022, March 17). Peran sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk mewujudkan peradilan modern dalam perspektif lintas negara. *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Buol Kelas II*.
- Khansa. (2021). Masyarakat multikultural jadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Universitas Gajah Mada.

Prodi Ilmu Pemerintahan. (2024, May 24). Tantangan dan prospek penggunaan teknologi dalam sistem peradilan. *Fakultas ISIPOL, Universitas Medan Area.*

Riyadi, E. (2020). Hukum hak asasi manusia (Cet. 4). *PT RajaGrafindo Persada.*

Setiyawan, W. B. M., Churniawan, E., & Faried, F. S. (2020). Information technology regulatory efforts in dealing with cyber attack to preserve state. *Jurnal USM*, 3(2), 275-295.

Sucipto, P. (2021, Nov 20). Pemanfaatan teknologi dalam dunia perundang-undangan. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.*

Taqwim, F. (2022). Kemajuan teknologi yang menghinati HAM. *Combine Resource Institution.*